



Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Transparansi Pemerintahan Desa Pasca Kasus Suap Rekrutmen di Kecamatan Tulangan

Ita Ayu Wulandari

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sunan Giri Surabaya, Negara Indonesia

*Penulis Korespondensi: itaayu.unsuri@gmail.com

Abstract. *The alleged bribery case in the recruitment of village officials in Tulangan District, Sidoarjo Regency, has become one of the issues affecting public perceptions of the transparency of village government implementation. This practice is considered contrary to the principles of good governance because it reduces openness, accountability, and public trust in the village government. This study aims to analyze public perceptions of village government transparency following the bribery case in the recruitment of village officials in Tulangan District, identify factors influencing these perceptions, and explain possible measures to strengthen village government transparency. The study used a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained from various secondary sources, including scientific journals, books, laws and regulations, official government documents, court decisions, and relevant media coverage. The analysis was conducted through identification, classification, interpretation, and synthesis of various sources related to the research focus. The results of the study indicate that the bribery case has resulted in a decline in public perceptions of information transparency, access to information, accountability, the decision-making process, and trust in the village government. These perceptions are influenced by public service experience, media coverage, apparatus integrity, the effectiveness of village government communication, and community participation. Strengthening transparency through information disclosure, increased accountability, digitalization of services, and public involvement in oversight are crucial steps to restore public trust.*

Keywords: *Bribery; Public Perception; Transparency; Village Government; Village Official Recruitment.*

Abstrak. Kasus dugaan suap dalam rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, menjadi salah satu permasalahan yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap transparansi pelaksanaan pemerintahan desa. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip *good governance* karena mengurangi keterbukaan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa pasca kasus suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, serta menjelaskan upaya yang dapat dilaksanakan guna memperkuat transparansi pemerintahan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, putusan pengadilan, dan pemberitaan media massa yang relevan. Analisis dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa kasus suap berdampak pada menurunnya persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi, akses informasi, akuntabilitas, proses pengambilan keputusan, serta kepercayaan kepada pemerintah desa. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh pengalaman pelayanan publik, pemberitaan media, integritas aparatur, efektivitas komunikasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat. Penguatan transparansi melalui keterbukaan informasi, peningkatan akuntabilitas, digitalisasi pelayanan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kata kunci: Pemerintahan Desa; Persepsi Masyarakat; Rekrutmen Perangkat Desa; Suap; Transparansi.

1. LATAR BELAKANG

Pedoman *good governance* membawa kedudukan yang signifikan terhadap dukungan terlaksananya pemerintahan yang bernilai dan konsisten. Terlaksananya pedoman itu menjadi atensi utama pemerintah pada pelaksanaan berbagai ketentuan juga pelayanan secara umum, bermoral, dan selaras dengan ketentuan yang berjalan. Demikian itu, pelaksanaan pemerintahan bisa berlaku secara lebih kompeten, serempak meminimalkan kesempatan terjadinya ketimpangan, meliputi aksi korupsi dan pelanggaran yang diizinkan (Pamungkas &

Rosyanfikri, 2021). Maka dari itu, responden masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *good governance* oleh pemerintah karena akan menimbulkan kegiatan yang berjalan sesuai ekspektasi dari berbagai kalangan, seperti halnya kegiatan akan lebih terstruktur, berkualitas dan efektif.

Satu diantara indikator yang utama terhadap pembentukan dan pertahanan kredibilitas masyarakat bagi pemerintah desa. Jenjang kejujuran pegawai desa terhadap pengelolaan administrasi dana desa menjadi landasan penilaian publik bagi kepercayaan dan komitmen pelaksanaan pemerintahan, yang awal di tengah proses meningkatnya alokasi administrasi dana desa yang berlanjut pada tiap tahunnya (Arsyad, 2021). Kejujuran adalah salah satu syarat utama yang harus di terapkan pada setiap pegawai pemerintah, karena masyarakat akan lebih menghargai kinerja pegawai dengan sikap tersebut.

Skandal jual beli jabatan dalam proses rekrutmen perangkat Desa di Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Polresta Sidoarjo di salah satu restoran tepatnya di daerah Gedangan, yang mengerahkan barang-barang bukti menakjubkan berwujud uang tunai Rp. 1,1 miliar, mobil dan buku rekening. Kecurangan ini menyertakan empat oknum kepala desa nonaktif yang ekstrak peserta seleksi dengan biaya Rp. 120 juta hingga Rp. 170 juta per orang sebagai jaminan kelolosan ujian. Akibat dari perilaku yang mencoreng transparansi itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Menghadiahi para pelaku dengan hukuman 4 tahun penjara. Kasus ini pun menimbulkan penghargaan atas ketegasan hukum sekaligus momentum meminimalisir korupsi terorganisasi yang sama pada tingkat desa.

Terkuaknya kasus dugaan suap dalam rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan telah menguasai cara pandang masyarakat terhadap implementasi pemerintahan desa. Kondisi tersebut menimbulkan reaksi bahwasannya proses pemenuhan jabatan perangkat desa belum seluruhnya dilakukan secara objektif dan sesuai kompetensi, sehingga masih rawan pada perlakuan yang menyimpang. Berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perangkat desa yang terpilih karena timbul keraguan pada integritas, kualitas dan legalitas proses seleksi yang sudah dilakukan. Dugaan keterkaitan dari berbagai pihak dalam perlakuan tersebut juga mempererat pandangan masyarakat bahwa korupsi yang terjadi tidak hanya secara individu, akan tetapi juga sebagian dari pola yang tersistem. Kondisi ini mendukung masyarakat guna menggugat perlakuan rekrutmen supaya lebih transparan melalui sistem seleksi berbasis teknologi yang bisa menampilkan hasil ujian secara terbuka dan langsung. Selain itu, timbul pula rasa kekhawatiran masyarakat bahwasannya besarnya nominal biaya yang di anggarkan kekuasaan dalam pengelolaan Dana Desa sebagai tindakan

pengembalian modal, sehingga menimbulkan pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi serta akuntabilitas pemerintahan desa (Nurmalasari & others, 2026; Siahaan & others, 2025)

Sebagian penelitian dalam lima tahun terakhir mengindikasikan bahwa transparansi ialah salah satu faktor utama dalam merealisasikan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian mengenai transparansi pemerintahan desa umumnya menganalisis aspek keterbukaan pengelolaan dana desa, akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan, aksesibilitas informasi publik, dan juga imbas transparansi terhadap kepercayaan masyarakat. Hasil penelitian secara umum memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa (Sofyani & Tahar, 2021). Kepercayaan ialah sebagai atensi utama saat ini karena hal tersebut bisa memicu faktor partisipasi dari masyarakat desa.

Beberapa penelitian lain juga mendeteksi bahwasannya transparansi dalam pengelolaan dana desa bisa dimanifestasikan melalui pengadaan informasi yang mudah diakses, keterbukaan proses pengambilan keputusan, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Kondisi tersebut dinilai bisa meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan menguatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan (Humaeroh et al., 2022). Maka dari itu, masyarakat hanya butuh di dengar aspirasinya serta transparansi akan semua kegiatan yang menyangkut kesejahteraan desa. Selain itu, ditemukan penelitian yang secara khusus mempersoalkan pandangan masyarakat terhadap transparansi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian itu memperlihatkan bahwa masyarakat berpotensi memberikan pandangan positif jika pemerintah desa bisa menyiapkan informasi secara terbuka dan mudah diakses (Ekasari & others, 2025). Akan tetapi, fokus penelitian dengan fenomena penyimpangan dalam proses rekrutmen perangkat desa (Norta, 2025). Pandangan masyarakat akan baik jika informasi yang diberikan akurat dan sistematis sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Menurut beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa kesenjangan penelitian, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada transparansi pengelolaan dana desa atau akuntabilitas keuangan desa, sedangkan transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan desa secara lebih luas, terutama setelah terjadinya kasus suap rekrutmen perangkat desa, hampir jarang dikaji (Humaeroh et al., 2022) transparansi dalam pelaksanaan oleh pemerintah desa sangat diharapkan oleh masyarakat karena bukan hanya transparansi dari pengelolaan dana desa dan akuntabilitas namun hal tersebut diperlukan guna bisa mengukur seberapa persen pemerintah berpihak pada publik. Penelitian terdahulu dominan menggunakan pendekatan kuantitatif guna menakar pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat, sehingga masih belum

banyak menggali secara mendalam tentang bagaimana pandangan masyarakat tercipta setelah timbulnya kasus korupsi atau suap yang melibatkan aparatur desa (Wirawan & Yaya, 2024) penelitian tersebut diharapkan bisa mengisi kekosongan itu dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa pasca kasus suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan (Zahro & others, 2023).

Sampai saat ini penelitian yang menganalisis tentang kasus suap rekrutmen perangkat desa sebagai konteks utama masih terbatas, khususnya di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sementara itu, kasusnya menjadi salah satu fenomena yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pelaksanaan pemerintahan desa. Maka dari itu, penelitian ini hadir guna mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pandangan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa pasca kasus suap rekrutmen di Kecamatan Tulangan (Wirawan & Yaya, 2024) kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian ini guna menambah penjelasan terkait persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa sekaligus memberikan kontribusi untuk pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih transparan dan juga akuntabel.

Letak kebaruan penelitian ini ialah fokus pada kajian yang menganalisis pandangan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa setelah terjadinya kasus suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan. Penelitian sebelumnya membedakan dari titik beratnya yaitu pada transparansi pengelolaan dana desa, akuntabilitas keuangan, atau pengaruh transparansi terhadap kepercayaan masyarakat secara umum, kajian penelitian ini yaitu bagaimana suatu kasus korupsi dalam proses rekrutmen perangkat desa bisa mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah desa. Selain itu, pendekatan kualitatif dilaksanakan pada penelitian ini sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa pasca terjadinya kasus tersebut.

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis pandangan masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa pasca kasus suap rekrutmen di Kecamatan Tulangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi pemicu yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap transparansi pemerintah desa serta menganalisis bagaimana dampak kasus suap rekrutmen terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan desa. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi para pemerintah desa dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatu. Pendekatan kualitatif digunakan karena bisa menyampaikan pemahaman secara mendalam terkait fenomena transparansi pemerintahan desa pasca kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan. Metode studi literatur dilaksanakan melalui penelaahan dari berbagai sumber tertulis yang relevan sehingga mendapatkan pemahaman secara komprehensif pada masalah yang dikaji. Analisis ini dilaksanakan dengan mengidentifikasi, membandingkan, menghubungkan, dan menginterpretasikan berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Penelitian ini berfokus terhadap kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penetapan lokasi dilaksanakan sebab kasus itu sebagai objek utama yang dianalisis dalam penelitian. Data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, putusan pengadilan, dan pemberitaan media massa yang kredibel (Fadli, 2021) melalui penggunaan dari berbagai sumber tersebut, diharapkan mendapatkan analisis yang lengkap terkait persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa pasca kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan.

Fokus penelitian tersebut yakni terhadap analisis persepsi masyarakat pada transparansi pemerintahan desa pasca kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan. Kajian difokuskan di lima aspek transparansi, yaitu keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap informasi, keterbukaan proses pengambilan keputusan, akuntabilitas pemerintah desa, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor yang menjadi pengaruh persepsi masyarakat dan juga berbagai upaya dalam meningkatkan transparansi pelaksanaan pemerintahan desa. Data yang digunakan yakni data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional maupun internasional, buku referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, putusan pengadilan, serta pemberitaan media massa yang memiliki kredibilitas dan relevansi dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilaksanakan berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian, tingkat kredibilitas, serta keterbaruan publikasi, terutama literatur yang diterbitkan pada periode 2020–2026 (Assyakurrohim et al., 2023). Demikian itu, penggunaan sumber data tersebut diharapkan bisa memberikan landasan yang kuat dalam menganalisis persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa pasca kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan secara lengkap.

Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan teknik dokumentasi melalui penelusuran berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan transparansi pemerintahan desa, persepsi masyarakat, *good governance*, serta kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan. Seluruh literatur yang didapat kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan ditelaah berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian supaya menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Teknik analisis data merujuk pada tahapan analisis data kualitatif. Tahapan analisis diawali dengan mengorganisasikan seluruh data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. kemudian dilakukan pembacaan secara menyeluruh untuk memahami isi data, lalu dilanjutkan dengan proses pengkodean (*coding*) berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, diinterpretasikan berdasarkan konsep transparansi dan *good governance*, serta dipresentasikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga dapat menjawab tujuan penelitian (Heriyanto & Nurislaminingsih, 2025). Melalui tahapan analisis tersebut, diharapkan didapatkan pemahaman yang lengkap mengenai persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa.

Keabsahan data dilaksanakan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, putusan pengadilan, dan pemberitaan media massa yang kredibel. Selain itu, setiap sumber diteliti berdasarkan kredibilitas penulis, relevansi isi, konsistensi informasi, serta tahun publikasi. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas dan reliabilitas yang layak sehingga bisa mendukung hasil penelitian secara ilmiah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus dugaan suap dalam rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan menjadi salah satu persoalan yang menimbulkan perhatian terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Pembahasan diawali dengan penjelasan rangkaian peristiwa yang menyebabkan terungkapnya kasus tersebut berdasarkan dari berbagai sumber literatur dan pemberitaan. kemudian dijelaskan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menurunnya legitimasi aparatur desa, terganggunya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan juga melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pemerintahan. Ketersediaan informasi menggambarkan komitmen pemerintah desa dalam memenuhi hak masyarakat guna memperoleh informasi publik. Pembahasan berpacu pada sejauh mana informasi mengenai kebijakan desa bisa diketahui oleh masyarakat, termasuk

berbagai program, peraturan, dan keputusan yang telah ditetapkan. Selain itu, dijelaskan juga penyampaian informasi mengenai pelayanan publik yang meliputi alur pelayanan, persyaratan administrasi, dan ketentuan yang berjalan. Transparansi penggunaan anggaran desa juga menjadi bagian penting karena menyatakan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa. Keseluruhan aspek tersebut memberikan gambaran mengenai penilaian masyarakat terhadap tingkat keterbukaan informasi setelah terjadinya kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa (Kusnan, 2021). Pembahasan pada aspek tersebut memberikan gambaran mengenai perubahan persepsi masyarakat terhadap keterbukaan informasi pemerintah desa setelah terjadinya kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan.

Akses terhadap informasi menjadi faktor yang menjadi penentu efektivitas pelaksanaan transparansi di dalam pemerintahan desa. Pembahasan meliputi kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi melalui pelayanan langsung ataupun media informasi yang disediakan pemerintah desa. Penggunaan media seperti papan pengumuman, media sosial, dan website desa juga menjadi perhatian dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat. selain itu, berbagai kendala yang masih menghambat akses informasi, seperti keterbatasan sarana komunikasi, penyampaian informasi yang belum merata, dan juga minimnya pembaruan informasi, turut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah desa. Penerapan transparansi juga tercermin di dalam proses pengambilan keputusan pada tingkat desa. Pembahasan meliputi pelaksanaan musyawarah desa sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan ataupun penetapan kebijakan, serta pandangan masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah desa dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan sejauh mana pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif, dan juga memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi (Janah et al., 2021). Pada uraian tersebut menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan merupakan aspek penting yang membentuk persepsi masyarakat terhadap transparansi pelaksanaan pemerintahan desa pasca kasus dugaan suap rekrutmen desa di Kecamatan Tulangan.

Akuntabilitas menjadi dasar di dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Pembahasan ditujukan pada bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan program kerja, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dijelaskan penilaian masyarakat terhadap kinerja aparatur desa setelah munculnya kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa. Dampak kasus tersebut terhadap pelaksanaan akuntabilitas juga dianalisis karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berjalan. Kepercayaan masyarakat yakni suatu modal penting dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang efektif. Pembahasan menunjukkan perubahan tingkat kepercayaan masyarakat setelah munculnya kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa, berbagai respon yang berkembang terhadap kinerja pemerintah desa, serta harapan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. rehabilitasi kepercayaan masyarakat dipandang sebagai salah satu langkah penting dalam memperbaiki hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat (Djafar et al., 2024). Pada pembahasan tersebut diharapkan bisa ditunjukkan sejauh mana akses informasi dan keterbukaan proses pengambilan keputusan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa setelah terjadinya kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan.

Persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa terbentuk melalui berbagai faktor yang saling memengaruhi. Pengalaman dalam menerima pelayanan publik menjadi salah satu dasar terbentuknya penilaian terhadap kualitas pemerintahan desa. Selain itu, informasi yang diperoleh melalui pemberitaan media mengenai kasus dugaan suap juga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan. Efektivitas komunikasi pemerintah desa, integritas pegawai dalam menjalankan tugas, serta keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan desa juga menjadi faktor yang menentukan terbentuknya persepsi terhadap tingkat transparansi pemerintahan desa. Perbaikan transparansi pemerintahan desa memerlukan berbagai langkah yang saling mendukung. Penyediaan informasi publik secara terbuka, lengkap, dan mudah diakses menjadi upaya untuk meningkatkan keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat. Penguatan sistem akuntabilitas diimplementasikan melalui pelaksanaan pelaporan dan pertanggung jawaban yang lebih jelas serta pengawasan yang berkelanjutan. Penerapan digitalisasi pelayanan desa dapat meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan melalui forum musyawarah ataupun proses partisipatif lainnya menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka. Selain itu, penguatan integritas pegawai desa melalui peningkatan profesionalisme, etika pelayanan, dan komitmen terhadap prinsip *good governance* diharapkan bisa memperkuat transparansi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Wahyiah, 2025). Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa penguatan transparansi tidak hanya bergantung pada keterbukaan informasi, tetapi juga memerlukan komitmen pemerintah desa, partisipasi masyarakat, dan penerapan prinsip *good governance* secara konsisten guna memulihkan

kepercayaan publik pasca kasus dugaan suap rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus dugaan suap dalam rekrutmen perangkat desa di Kecamatan Tulangan memberikan pengaruh terhadap persepsi masyarakat mengenai transparansi pelaksanaan pemerintahan desa. adanya kasus tersebut menimbulkan keraguan terhadap keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi, menjalankan proses pengambilan keputusan, melaksanakan pelayanan publik, dan juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan. Kondisi tersebut juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas pegawai desa dan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Persepsi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pengalaman dalam memperoleh pelayanan publik, kemudahan mengakses informasi, intensitas pemberitaan media mengenai kasus suap, efektivitas komunikasi pemerintah desa, integritas pegawai desa, dan juga tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan menjadi faktor-faktor yang membentuk penilaian masyarakat terhadap transparansi pemerintah desa. Semakin baik pelaksanaan aspek-aspek tersebut, semakin baik juga persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penguatan transparansi menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan publik pasca terjadinya kasus dugaan suap. Upaya tersebut bisa diwujudkan melalui penyediaan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses, penguatan sistem akuntabilitas, optimalisasi pelayanan berbasis digital, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, juga penguatan integritas pegawai desa. Penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan bisa menciptakan pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih terbuka, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Arsyad, M. (2021). Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Garuntungan, Kabupaten Bulukumba. *Universitas Hasanuddin*.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 1–9.
- Djafar, H., Monoarfa, R., & Husain, S. P. (2024). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Studi Kasus: Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3929–3944.

- Ekasari, & others. (2025). Studi tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, 14(1). <https://doi.org/10.56444/qhxp2c32>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/>.
- Heriyanto, & Nurislaminingsih, R. (2025). Dari Kode ke Tema : Teknik Pengodean bagi Peneliti Kualitatif. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan Dan Informasi*, 9(2), 295–303.
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 79–91.
- Janah, B. R., Purnama, S., & Syamsuri. (2021). Impelentasi Prinsip-Prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *JPALG: Journal of Public Administration and Local Governance*, 5(2), 132–143.
- Kusnan. (2021). Keterbukaan Pemerintah di Tingkat Desa: Studi Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 87–102.
- Norta. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berbasis Web di Mata Masyarakat Desa Parit Baru. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 2(3), 1–14.
- Nurmalasari, & others. (2026). Efektivitas Implementasi SISKEUDES untuk Meningkatkan Transparansi APBDes melalui Media Informasi Digital di Desa Rahayu Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. *Public Service and Governance Journal*, 7(2). <https://doi.org/10.56444/psgj.v7i2.3847>
- Pamungkas, T. K., & Rosyanfikri, R. (2021). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. *Jurnal Paradigma Madani Ilmu Sosial, Politik Dan Agama.*, 8(2), 36–45.
- Siahaan, R. M., & others. (2025). Kesiapan Pemerintah Desa Muaro Pijoan dalam Penerapan E-Government untuk Meningkatkan Transparansi, Pelayanan Publik, dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital. *Ebisnis Manajemen*, 3(3). <https://doi.org/10.59603/ebisman.v3i3.1102>
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10–25.
- Wahyiah, I. R. (2025). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. *Jiia: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 15(1), 116–127.
- Wirawan, R. F., & Yaya, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Keadilan Terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Apakah Kepuasan Masyarakat Memediasi? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 87–104.
- Zahro, N. S., & others. (2023). Faktor-faktor Pendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3). <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1497>